

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, beberapa hal yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan fiskal (K_f) berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap PMA, artinya semakin ekspansif kebijakan fiskal (semakin besar pengeluaran pemerintah) maka akan semakin banyak PMA yang masuk ke Indonesia. Kebijakan fiskal (K_f) dalam penelitian ini tidak dapat memprediksi PMA dengan baik, karena ada gangguan Asumsi Klasik yaitu *superfluous variable*.
2. Infrastruktur (I_n) berpengaruh positif secara signifikan terhadap PMA, artinya semakin baik kondisi infrastruktur (semakin besarnya anggaran pembangunan infrastruktur) maka akan semakin banyak jumlah PMA yang masuk ke Indonesia.
3. Perizinan (I_z) berpengaruh positif secara signifikan terhadap PMA, artinya semakin baik sistem perizinan (sederhana dan tidak membutuhkan biaya yang besar) maka akan semakin banyak jumlah PMA yang masuk ke Indonesia.

5.2 Saran

Beberapa saran yang dapat Penulis ajukan berkaitan dengan hasil penelitian adalah:

1. Untuk mengefektifkan pelaksanaan kebijakan fiskal ekspansif agar mendorong PMA yang tinggi, pemerintah dapat bekerjasama dengan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Tindakan yang dilakukan yaitu membelanjakan pengeluaran pemerintah lebih besar¹¹² dan dukungan BI untuk mengatur tingkat suku bunga. BI menambah jumlah uang beredar untuk mengurangi tingkat suku bunga dan menjual obligasi pemerintah untuk menutupi defisit anggaran. Selain itu pemerintah secara independent dapat melakukan subsidi investasi berupa membebaskan biaya perizinan (termasuk mempersingkat waktu dan administrasi perizinan) dan meningkatkan kualitas infrastruktur yang mendukung terciptanya investasi melalui anggaran pembangunan infrastruktur yang lebih besar.
2. Untuk meningkatkan kinerja infrastruktur, pemerintah hendaknya:
 - a. Melibatkan pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur,
 - b. Membagi kewajiban dengan tegas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur. Menetapkan tarif yang jelas dalam bidang infrastruktur, sehingga menjadi daya tarik bagi investor swasta untuk berinvestasi;
 - c. Membuat kerangka kerja dan spesialisasi pelayanan infrastruktur dimana terjalin kerjasama antara pihak pemerintah dengan pihak swasta dari pusat sampai daerah.
3. Untuk meningkatkan kualitas perizinan, pemerintah hendaknya:

- a. Perizinan usaha dapat dilakukan dengan pelayanan internet, untuk menghindari kebocoran biaya dan mempersingkat waktu perizinan;
- b. Penghapusan peraturan perizinan yang dianggap sama atau mirip;
- c. Standarisasi pelayanan perizinan, yaitu satu kantor pelayanan dapat mewakili beberapa instansi yang berhubungan dengan kegiatan usaha. Contohnya perizinan yang telah diterbitkan oleh BKPM secara *the facto* dan *the jure* mewakili pendaftaran ke Deperdag, Pemda dan instansi lainnya.

